



**Pemerintah
Provinsi
Gorontalo**

LPPD DINAS SOSIAL

2025

Dinsos.gorontaloprov.go.id
Jl. Brigjen piola isa Kel. Dulomo selatan
Kec. kota utara Kota Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas izin dan hidayah- Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Laporan ini disusun selain sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 baik pendanaan APBD, APBN maupun Tugas Pembantuan (TP) dan juga merupakan instrumen untuk menjadi alat kontrol didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk perbaikan laporan di masa-masa mendatang. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang.

Gorontalo, Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



SAGITA WARTABONE, ST,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197112052002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah Provinsi Gorontalo	1
c. Informasi Umum Data kependudukan	3
d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);.....	3
e. Rincin Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	4
f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Berada di Setiap Perangkat daerah.....	5
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	5
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	6
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;.....	6
b. Visi dan Misi Kepala Daerah;.....	7
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	10
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	10
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	10
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	11
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	11
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	11
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	11
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Kinerja.....	12

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	13
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	14
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	15
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	21
BAB IV PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	22
4.1 URUSAN SOSIAL	22
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	22
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	22
4.1.3 Realisasi	23
4.1.4 Alokasi Anggaran Penerapan SPM.....	25
4.1.5 Dukungan Personil.....	25
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	26
4.2 Program dan Kegiatan.....	26
BAB V PENUTUP	28

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 Kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 Kota.

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,71%.

b. Data Geografis Wilayah

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km², atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

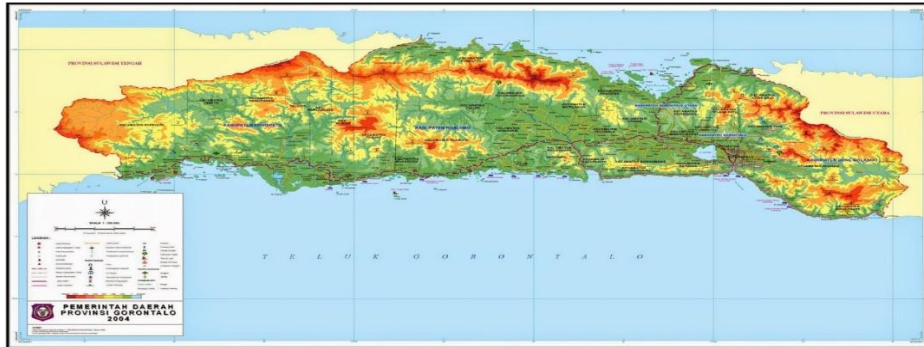
Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan
Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	124	124	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,71%.

Gambar 1.1
Peta Provinsi Gorontalo



c. Informasi Umum Data Kependudukan;

Pada Sensus Penduduk mencatat jumlah penduduk Gorontalo pada Semester 2 Tahun 2025 sebanyak 1.263.405 jiwa. Dengan rincian per kabupaten/Kota yakni Kabupaten Boalemo sejumlah 154.108 jiwa, Kabupaten Gorontalo sejumlah 428.370 jiwa, Kabupaten Pohuwato 165.752 jiwa, Kabupaten Bone Bolango sejumlah 176.320 jiwa, Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 133.537 jiwa, dan Kota Gorontalo sejumlah 205.318 jiwa.

d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);

Adapun Jumlah kabupaten /Kota di Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1
Jumlah Kabupaten /Kota Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota
(1)
Kab. Boalemo
Kab. Gorontalo
Kab. Pohuwato
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara
Kota Gorontalo
PROV. GORONTALO

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2025)

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dinas Sosial melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial serta Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan /Fungsi Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Sosial	Bidang Sosial	7	10	51	68

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)

Alokasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 sampai dengan perubahan APBD sebesar Rp. 22.897.897.120,00 dengan rincian jenis belanja, sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp 8.622.320.192,00 (37,65%)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 13.580.743.928,00 (59,31%)
- Belanja Modal : Rp. 694.833.000,00 (3,03%)

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp. 21.124.492.381,00 atau **92,25%**. Terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp 8.000.414.262,00 (37,87%)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 12.430.839.689,00 (58,84%)
- Belanja Modal : Rp. 693.238.430,00 (3,28%)

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Sosial			
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.391.186.241,-	10.460.364.938,-
b.	Program	Pemberdayaan Sosial	1.129.666.431,-	953.918.207,-
c.	Program	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	115.831.850,-	101.280.625,-
d.	Program	Rehabilitasi Sosial	3.058.442.942,-	2.922.945.108,-
e.	Program	Perlindungan Jaminan Sosial	5.577.580.656,-	5.391.147.169,-
f.	Program	Penanganan Bencana	1.171.422.500,-	864.572.766,-
g.	Program	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	453.766.500,-	430.263.568,-
Jumlah			22.897.897.120,-	21.124.492.381,-

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Permasalahan strategis pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang menjadi tantangan serta hambatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran Masyarakat yang seluas-luasnya, baik perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, LKS demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan serta isu dan tantangan pembangunan, Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah: **“Gorontalo Maju dan Sejahtera”**

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : **Gorontalo Maju**, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Indeks Pembangunan Manusia, Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia.

3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indicator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Kemiskinan	12,62	13,24	11,62

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo

Rumus Perubahan :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Bid. Rehsos	
2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$	Bid. Rehsos	
3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	$\frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$	Bid. Rehsos	
4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Bid. Rehsos	

		panti			
5		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi.	$\frac{6659}{6659} \times 100\% = 100\%$	Bid. Linjamsos	
6		Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	$\frac{9000}{9000} \times 100\% = 100\%$	Bid. Linjamsos	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana penjelasan berikut :

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Gorontalo dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20 %

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 2 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja, semua indikator kinerja dapat diukur secara utuh.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		(%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	51,92	99,40%
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20%	45%	225%

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	52,23	51,92	-	-	-
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	20%	45%	11 %	43,77%	397%

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah sebagaimana tabel berikut :

NO	Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (tujuan / Impact /Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2025		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Urusan Sosial					
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%
		Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100%	100%	100%
		Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100%	100%	100%
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%	100%
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%	100%

2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	31,25%	31,25%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	98,91%	98,91%
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	90%	90%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	100%	100%	100%

4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7,97%	11,75%	147%
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	16,19%	36,42%	224%
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	100%	100%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, social dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	18%	23%	126%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan social	100%	100%	100%
		Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	100%	100%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam menilai capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, waktu pelaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis ***“Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat”*** dengan indikator sasaran ***“Persentase Masyarakat Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial”*** diperlukan realisasi dana sebesar Rp 21.124.492.381,- atau 92,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.897.897.120,-

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan, penggunaan anggaran pada umumnya telah dilaksanakan secara **efisien**, yang tercermin dari **realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% namun mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran telah dilakukan secara optimal.

Dari aspek **sumber daya manusia**, pemanfaatan aparatur telah dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian beban kerja yang jelas serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penambahan jumlah personel.

Ditinjau dari **efisiensi waktu**, sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem administrasi berbasis digital turut mendukung percepatan proses pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja. Hal ini terlihat dari tercapainya indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi secara berkelanjutan melalui perbaikan perencanaan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik.

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang disusun secara terarah dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, dan Renstra. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun pelaporan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, baik dari sisi waktu pelaksanaan, alokasi anggaran, maupun target output yang dihasilkan. Program-program prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis daerah menjadi fokus utama, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara optimal dan tepat sasaran.

Dari hasil evaluasi, program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian target kinerja umumnya merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian indikator kinerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pelayanan.

Selain itu, sinergi antar program dan kegiatan lintas perangkat daerah turut mendukung pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mampu menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pencapaian hasil. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah juga berperan dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja sesuai target, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melebihi target. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pengendalian, khususnya

terkait dengan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi sinergi antar perangkat daerah perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Analisis program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

❑ Sasaran **“Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat”** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut yaitu **“Persentase Masyarakat Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial”**. Dalam pencapaian indikator tersebut ada 6 program dan 11 kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu :

1) Program Pemberdayaan Sosial

❑ Kegiatan :

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

❑ Kegiatan :

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

2). Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

❑ Kegiatan :

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

3). Program Rehabilitasi Sosial

☐ Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Asrama yang mudah diakses
- Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
- Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar

☐ Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Didalam Panti

Sub Kegiatan :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan Permakanan
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti

☐ Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Didalam Panti

Sub Kegiatan :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang

- Penyediaan asrama yang mudah diakses
- Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan social
- Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemulasaraan
- Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti

☐ Kegiatan :

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza didalam panti

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar didalam panti bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza didalam panti

4). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

☐ Kegiatan :

Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Sub Kegiatan :

- Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

☐ Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
- Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

5). Program Penanganan Bencana

☐ Kegiatan :

Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

6). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

▣ Kegiatan :

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Untuk tahun 2025 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan melalui beberapa Departemen/Lembaga/ Kementerian kepada yang diterima oleh SKPD Provinsi Gorontalo, **namun untuk Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam tugas pembantuan.**

BAB IV**PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****4.1 URUSAN SOSIAL****4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang urusan sosial di daerah provinsi terdiri atas mencakup

5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah **97,35** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

4.1.3 Realisasi

Tabel Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun	Capaian		Ket
		Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di DalamPanti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam Panti	2025	100	98,91	
		Persentase(%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	2025	100	100	
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2025	100	100	
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi				

		Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti	2025	100	90	
		Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti				
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Provinsi	2025	100	97,85	
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Provinsi				
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo %					97,35%	

4.1.4 Alokasi Anggaran Penerapan SPM

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	
	- Program Rehabilitasi Sosial	2.732.526.942
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.171.422.500
2	APBN (dekonsentrasi)	
	- Program Rehabilitasi Sosial	0
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0
3	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	0
Jumlah		3.903.949.442

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

a. **Bidang Rehabilitasi Sosial :**

PNS : 13 orang
 PPPK Paruh Waktu : 15 orang
 Pendamping LU : 1 orang
 Pendamping Disabilitas : 2 orang
 Supervisor Sakti Peksos : 1 orang.

b. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :**

PNS : 12 orang
 PPPK Paruh Waktu : 15 orang
 Tagana : 809 orang
 KSB : 1290 orang
 Pelopor Perdamaian : 7 orang.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum Tersedianya Panti Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi social penyandang disabilitas terlantar didalam panti.
- Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi social, selama ini kami masih Kerjasama dengan Panti Sosial Anak milik masyarakat.
- Belum Tersedianya Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selama ini kami masih menyewa gedung untuk pelayanan rehabilitasi social lanjut usia terlantar dalam panti
- Belum tersedianya Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan/Pengemis baik milik pemerintah maupun milik masyarakat
- Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- Terbatasnya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan Penanggulangan Bencana
- Keterbatasan air bersih, fasilitas kesehatan

Solusi :

- Untuk mengantisipasi proses pendirian Panti Sosial Anak Terlantar sebagai layanan teknis Dinas Sosial Provinsi yang memerlukan waktu yang cukup panjang, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mengupayakan proses layanan rehabilitasi sosial berbasis panti bekerja sama dengan LKS milik masyarakat dalam hal ini LKSA Al Inayah Kab. Bone Bolango, LKSA Darul Mutmain Tabongo Kab. Gorontalo, RPSA Amal Sholeh, dan LKS Ummu Syahidah.
- Perlunya pembangunan Panti Sosial Terpadu untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar.
- Penyediaan tenaga/SDM yang terlatih

- Memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana.
- Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan Dinas Sosial Kab/Kota dan Pemerintah Pusat.

4.2 Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
URUSAN SOSIAL			
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan asrama yang mudah diakses
			Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti
			Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
			Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
			Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam panti social
			Pemberian Bimbingan, fisik, mental, spiritual dan sosial
			Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian pelayanan penelusuan keluarga
			Pemulasaran
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 memuat capaian kinerja urusan sosial. Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan tersebut.

Demikian Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi pertanggung jawaban Dinas Sosial Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial di tahun-tahun yang akan datang.